

BAB IV

BASIC PENGETAHUAN DAN KONSTRUKSI SOSIAL ELIT PARTAI POLITIK TENTANG FORMALISASI SYARIAH DI KABUPATEN PAMEKASAN

A. Basic Pengetahuan dalam teori Konstruksi Sosial

Basic pengetahuan yang dimaksud dalam bab ini merupakan latar belakang pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing informan yang sudah menjadi sistem kognitif dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga pada akhirnya sistem tersebut menjadi pola perilaku untuk bertindak yang terverbalisasi dalam bentuk perbuatan dan kebijakan yang diambil. Dalam konteks penelitian ini pola perilaku untuk bertindak yang dimiliki oleh masing-masing elit partai politik, baik partai Islam maupun partai nasionalis dan partai nasionalis-religius dalam memperjuangkan formalisasi syariah di Pamekasan. Proses dari sistem pengetahuan menjadi sistem perilaku inilah yang disebut sebagai konstruksi sosial. Dalam konteks penelitian ini, sistem pengetahuan yang dimiliki oleh para informan tentang perjuangannya dalam mengupayakan formalisasi syariah Islam sangat variatif, disesuaikan dengan kultur latar belakang keluarga dan pendidikan yang terkonstruks dalam sistem kognitif mereka. Sehingga dari varian sistem kognitif tersebut, ekspektasinya akan diketahui pola *behind motive* para elit partai politik dalam memperjuangkan formalisasi syariah di Pamekasan. Agar lebih mudah memahami pola *behind motive* para elit partai politik, maka sesuai temuan di lapangan, penulis mengklasifikasikan elit politik berdasarkan ideologi partai mereka; yakni elit politik yang berideologikan Islam, yang berideologikan nasionalis religius, maupun elit partai politik yang berideologikan nasionalis dalam memperjuangkan formalisasi syariah di Pamekasan.

B. Sistem Pengetahuan dan Konstruksi Sosial Elit Partai Politik Islam tentang Upaya Formalisasi Syariah di Pamekasan

Untuk lebih mempermudah dalam penelitian ini, penulis hanya mengambil dua partai politik yang berideologikan Islam; yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera.¹

1. Elit Partai Islam PPP Berlatarbelakang Santri dengan *Basic Pendidikan Agama*

Holili Yasin² merupakan seorang elit partai Islam PPP yang berlatarbelakang keluarga santri, Ia dilahirkan di Desa Plakpak Kecamatan Pagantenan Kabupaten Pamekasan Madura pada tanggal 15 Oktober 1962, oleh seorang ayah yang berlatarbelakang Guru pesantren dan sangat ditokohkan di kalangan masyarakat *nahdliyin* Pamekasan. Pekerjaan ayahnya adalah sebagai seorang guru di salah satu pondok Banyuanyar dan juga sebagai seorang petani. Suami dari Halimatus Sa'diyah ini sejak usia 7 tahun sudah mengenyam pendidikan agama yaitu di Madrasah Ibtidaiyyah Pamekasan Madura. Namun karena dirasa bekal pendidikan agama belum cukup membekalinya, dan bagi ayahnya pendidikan agama sangat penting sebagai *basic character building* dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akhirnya ayahnya memasukkan Holili ke Pondok Bata-bata pada 1978-1981. Tidak hanya puas *nyantri* di pondok Bata-bata, ia juga melanjutkan *nyantri* di pondok Paiton Probolinggo. Namun proses *nyantri* di Paiton tersebut tidak samapi lulus karena persoalan ekonomi, hingga akhirnya ia memutuskan kembali ke Madura dan meneruskan *nyantri* di pondok Banyuanyar pada tahun 1981 hingga tahun 1983. Sejak periode inilah, Holili remaja mulai mencari jati dirinya sebagai seorang santri Madura yang militan terhadap tradisi keislaman ala Madura, sehingga dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut Holili remaja ketika *nyantri* dia memutuskan untuk aktif di organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu IPNU. Holili pun selalu meramaikan lembaga NU tersebut dengan kajian akademis kitab kuning di lembaga *bahtsul masail*.

¹ Dalam Pasal 2 AD/ART PKS disebutkan bahwasanya asasnya adalah Islam, dalam bab II AD/ART PPP juga disebutkan bahwa PPP berasaskan Islam

² Holili, *Wawancara*, Pamekasan, 22 Maret 2013

Setelah tamat dari nyantri di Pondok Banyuanyar, Ketua DPRD Pamekasan ini memutuskan untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi di IAIN Madura. Akan tetapi ketika melihat kehidupan mahasiswa yang sangat bebas dan bergaya hidup hedonis, hati Holili terus gelisah karena melihat masyarakat Madura yang Islamnya hampir 97 %, ternyata masih banyak masyarakatnya seperti mahasiswa yang pola hidupnya tidak Islami. Sehingga akhirnya ia memutuskan untuk bergabung dengan PMII. Namun di PMII ternyata ia merasa masih belum menemukan suatu yang baru, sehingga pada akhirnya ia memutuskan untuk masuk organisasi HMI. Di organisasi tersebutlah Holili merasa menemukan sebuah penyegaran religius. Namun keaktifannya di HMI tidak bertahan lama, sebab tuntutan profesi dia sebagai ustad di Ponpes al Mujtama' mengharuskan dedikasinya harus dicurahkan secara totalitas di dalam pondok tersebut.

Sampai suatu ketika Ayah dari 3 orang anak ini dilamar oleh PPP Pamekasan. Ketika ia menjadi anggota partai PPP ia pun sangat *getol* menyuarakan ide-ide Islam substantif yang memang hal itu sangat dipupuk dan tumbuh subur di partai yang berbasis Islami ini. Dalam perjalanannya ia pun bertambah yakin dan mantap dengan partai PPP merupakan partai yang benar dan yang ia cari selama ini. Sebab tradisi yang Islam ajarkan benar-benar diterapkan tidak hanya mengawang pada tataran teori dan wacana saja, akan tetapi *landing* dalam tataran kebijakan partai yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Aspek-aspek ajaran Islam yang aplikatif inilah yang menurutnya bisa menepis budaya liberal pro Barat di kalangan masyarakat.

Tidak hanya itu, menurut Holili PPP merupakan salah satu partai yang bertujuan menegakkan *syariahiyah*. Sehingga sebagai konsekuensinya, *syariahiyah* tidak akan pernah berdiri tanpa adanya keterlibatan partai Islam dalam setiap kebijakan politiknya, sebagaimana dalam kaidah ushul "*ma la yatimmu al wajib illa bihi fahuwa wajib*".

2. Elit partai Islam PKS Berlatarbelakang santri dengan Basic Pendidikan Agama

Ustadz Suryono³ akrab dengan sapaan Pak Sur adalah salah seorang elit PKS Pamekasan yang sebelumnya adalah aktivis Persis yang lahir di Purwokerto pada tanggal 2 September 1969. Latar belakang keluarganya tergolong awam terhadap agama. Suryono kecil menghabiskan masa belajarnya di pendidikan umum dan sangat minim terkait dengan pengetahuan agama. Pada tahun 1972 Suryono lulus dari sekolah dasar negeri (SDN) Daerah Khusus Istimewa Aceh, lalu Pak Sur melanjutkan sekolahnya di SMPN I Birrun Aceh dan lulus pada tahun 1975, lalu melanjutkan ke jenjang SMA dengan institusi yang sama dan lulus pada tahun 1978.

Sejak di SMA inilah Suryono mulai mengenal pemikiran Persis. Seusia kebanyakan siswa seperti Suryono waktunya banyak dihabiskan untuk bermain dan bersenang-senang, akan tetapi bagi Pak Sur tidak. Ia mencoba mencari pengetahuan tambahan terkait pengetahuan agama, sebab porsi pendidikan agama yang diajarkan hanya 5 % itupun kurang maksimal. Sehingga akhirnya Pak Sur remaja mencoba mencari sendiri terkait dengan pengetahuan agama. Yang mana sejak itulah Pak Sur mulai bergabung dengan Persis tapi hanya sekedar menjadi anggota simpatisan saja. Karena Pak Sur dinilai sepaham dengan ide-ide Persis. Bagi Pak Sur konsep yang ditawarkan Persis sangat *kaffah* dibandingkan dengan materi-materi pengajian yang ia dengarkan di masjid-masjid. Pak Sur remaja sampai sekarang dikenal oleh banyak temannya sebagai pribadi yang menyenangkan tapi sangat eksklusif kalau berbicara masalah agama. Keeksklusifan Pak Sur disinyalir karena terpengaruh oleh pemikiran Persis yang sangat literalis dan Puritan.

Setelah tamat dari SMA Aceh Pak Sur memutuskan untuk hijroh ke Madura karena semua keluarganya harus pindah tugas di pamekasan, atas dasar kesempatan itu Pak sur meneruskan studi lanjutnya di IAIN Pamekasan mengambil jurusan pendidikan Islam, disinilah Pak Sur mulai kembali bergabung dengan organisasi yang pernah ia geluti ketika

³ Suryono, *Wawancara*, Gedung DPRD Pamekasan, 21 Maret 2013

SMA dulu. Sejak Pak Sur merapatkan barisan di organisasi tersebut, pak Sur sangat vocal mengungkap isu-isu formalisasi syariah.

Aktivitas Pak Sur berlanjut ketika ia memutuskan bergabung dengan Partai Keadilan (PK) nama sebelum menjadi PKS. Bersama sejumlah ikhwan-ikhwan PKS yang memiliki ideologi yang sama Pak Sur sering mengikuti pertemuan-pertemuan dengan petinggi partai PKS untuk membahas bagaimana kemajuan PKS ke depan. Pak Sur juga sering dilibatkan untuk mengisi kajian-kajian di desa-desa binaan PKS baik dalam bentuk seminar maupun *halaqoh*. Samapai-sampai karena integritas dan militansi yang tinggi ia dicalonkan PKS untuk maju menjadi anggota dewan DPRD Pamekasan pada tahun 2009. Pencalonan tersebut pun berhasil dengan kemenangan PKS. Akhirnya ia pun menjabat sebagai anggota dewan DPRD Pamekasan. Selama Ia menjabat Pak Sur masih tetap aktif menyuarakan ide-ide formalisasi syariah di Pamekasan, walaupun banyak menuai tantangan dari fraksi-fraksi lain yang memang tidak sepaham dengannya. Dalam berpolitik perjuangan Pak sur selalu disandarkan dengan doktrin normatif Al Quran dan hadits. Sehingga pijakan teologis dalam kapasitasnya sebagai anggota dewan sangat kuat.

C. Sistem Pengetahuan dan Konstruksi Sosial Elit Partai Politik Nasionalis-Religius tentang Upaya Formalisasi Syariah di Pamekasan

Untuk lebih mempermudah dalam penelitian ini, penulis hanya mengambil dua partai politik yang berideologikan Nasionalis-religius; yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat.⁴

⁴ Dalam Anggaran Dasar PKB BAB III tentang ASAS DAN PRINSIP PERJUANGAN dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Partai PKB berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dalam Pasal 4 juga disebutkan bahwa Prinsip perjuangan Partai adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlusunnah Waljama'ah. Sedangkan dalam Pasal 3 AD/ART Partai Demokrat jelas-jelas disebutkan bahwa partai ini berideologikan nasionalis-religius.

1. Elit partai nasionalis-religius PKB Berlatarbelakang santri dengan *Basic Pendidikan Agama*

Adapun Elit partai Islam yang mempunyai latarbelakang keluarga santri dan berpendidikan agama berbasis pondokan ini adalah Imam Khusairi, yang biasa akrab disapa dengan KH Khusairi. Khusairi⁵ merupakan seorang anggota dewan perwakilan rakyat daerah pamekasan dari fraksi PKB dari tahun 2009-sekarang. Bahkan posisinya di PKB sebagai ketua DPC Pamekasan, sekaligus Kiyai NU yang menjadi pengasuh di pondok Al-Karamah, Plak-pak, Pamekasan. Dalam hasil interview yang beliau sampaikan, Beliau mengungkapkan bahwa sejak kecil beliau dibiasakan dengan pendidikan agama oleh orang tuanya yang basis keagamaanya bisa dibilang cukup kuat. Ayahnya yang asli Pamekasan Madura adalah seorang ulama yang cukup difigurkan di daerah Plakpak. Selain itu beliau adalah seorang Aktivis ormas NU. sedangkan Ibunya adalah seorang Ibu rumah tangga yang fokus mendidik putra-putranya secara totalitas.

KH Imam Khusairi adalah anak kedua dari lima bersaudara. Ketika kecil Imam Khusairi bersaudara sangat disiplin dalam melakukan kegiatan keagamaan bersama dengan ayah dan ibunya. Imam Khusairi bersaudara sejak kecil sudah ditanamkan oleh kedua orang tuanya untuk tidak meninggalkan ibadah-ibadah wajib seperti sholat, puasa, ngaji dan lain-lain. tidak hanya berhenti pada pendidikan kultural, Imam Khusairi bersaudara *basic* keagamaanya diperkuat di sekolah formal seperti Madrasah Ibtidaiyyah Plakpak dan Madrasah Tsanawiyah Plakpak, dalam bidang akademis Imam Khusairi tergolong santri yang menonjol dalam bidang keagamaan. Sehingga setamat dari Madrasah tsanawiyah plakpak Imam Khusairi melanjutkan ke jenjang pendidikan agama yaitu pondok pesantren Banyuanyar. Setamatnya dari Banyuanyar Imam Khusairi kembali mendalami ilmu agama di

⁵Imam Husairi, *wawancara*, Pondok Al-Karamah Pamekasan, 22 Maret 2013

peguruan tinggi dengan mengambil pendidikan Islam di STAIN Pamekasan Madura pada tahun 1989.

Ketika masuk perguruan tinggi Imam Khusairi sering berinteraksi dengan teman-teman sejawatnya untuk mengkaji Islam secara intensif dalam sebuah komunitas kultural NU di Pamekasan. Beliau pun juga terlibat aktif untuk mendedikasikan keilmuan agamanya di pondok al-Karamah, Plakpak. Bahkan karir keulamaannya melejit ketika beliau menikah dengan seorang putri Kiyai di Pamekasan. Jam terbang khutbahnya bertambah drastis dan sangat signifikan di pondok-pondok atau di masjid-masjid Pamekasan bahkan karirnya di bidang politik dimulai ketika beliau dipinang oleh PKB untuk menjadi pengurus struktural di Pamekasan.

Setelah ia menyelesaikan S-1 pendidikan Islam di STAIN Madura, Imam Khusairi juga masih aktif mengisi kajian-kajian kitab kuning di pondok-pondok di luar yayasan yang beliau asuh ataupun di forum akademis seperti seminar, Saresahan dan lain sebagainya. Ibarat buah kelapa semakin tua usia beliau integritas keilmuannya juga semakin banyak dan kental. Hal itu kemudian diikuti dengan keterpanggilan sosialnya untuk menjadi negarawan dari representasi ulama yang peduli terhadap kemajuan masyarakat Pamekasan. Atas keterpanggilannya itu, beliau pun akhirnya mencalonkan diri sebagai anggota dewan DPRD Pamekasan lewat kendaraan politik PKB. Beliau sangat *getol* menyuarakan gagasan Islam keindonesiaan lewat forum-forum yang difasilitasi oleh PKB. Beliau pun sejak di DPRD sangat mempunyai komitmen kuat dalam rangka memformalisasikan syariaat Islam di Pamekasan. Hal ini beliau lakukan karenan melihat kegelisahan masyarakat Pamekasan yang semakin hari semakin jauh dari hukum Islam.

2. Elit partai nasionalis-religius Partai Demokrat Berlatarbelakang santri dengan Basic Pendidikan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pamekasan dari fraksi Partai Demokrat yang bernama Khoirul Kalam⁶ ini dilahirkan di Pamekasan pada 14 Februari 1974 yang lalu. Ia menamatkan sekolah perdananya di SDN Jungcangcang VI Pamekasan selama 6 tahun. Setamat sekolah Dasar, kemudian ia melanjutkan ke jenjang berikutnya di SMPN I Pamekasan. Meskipun pada eranya waktu itu banyak di antara teman-teman sebayanya yang putus sekolah, namun ia tidak berhenti disitu. Dengan semangat yang didukung oleh kedua orang tuanya, ia melanjutkan studi ke jenjang sekolah menengah atas di SMAN I Pamekasan. Bahkan setamat SMA ia masih bersemangat untuk terus melanjutkan studinya. Kemudian ia tertarik untuk memilih melanjutkan studinya di Fakultas Administrasi di Universitas Islam Madura (UNIRA).

Selama studi ia menyadari bahwa banyak waktu yang harus ia manfaatkan dengan baik selama di bangku kuliah. Dengan ketekunannya, ia berhasil membagi waktunya di samping harus kuliah dan banyak membaca buku untuk menunjang kebutuhan akademisnya, ia juga mendedikasikan waktu dan ilmunya dengan *nyambi* mengajar di salah satu sekolah swasta, yakni di Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Tidak hanya cukup disitu, sebagai seorang mahasiswa ia merasa terpanggil untuk mengikuti organisasi kemahasiswaan. Karenanya ia memilih untuk aktif di sebuah organisasi ekstra kampus, yakni organisasi HMI. Bukan hanya sekedar menjadi anggota atau kader HMI yang sekedar ikut-ikutan teman-temannya, ia menunjukkan keseriusannya di organisasi tersebut dengan menjadi ketua HMI mulai sejak di Komisariat hingga ia berhasil menjabat Ketua HMI Cabang Pamekasan pada tahun 2000. Greget kemampuan organisatorisnya inilah yang kelak mengantarkan Ia tertarik di dunia perpolitikan. Sehingga akhirnya ia dilamar oleh Partai Demokrat untuk menjadi calon legislatif di Daerah Pamekasan. Bukan tanpa alasan Khoirul Kalam memilih Partai Demokrat sebagai pelabuhan partainya, sebab Demokrat merupakan salah satu partai yang

⁶Khoirul Kalam, *wawancara*, Gedung DPRD Pamekasan, 21 Maret 2013

memiliki jargon partai nasionalis relegius. Faktor jargon dan motto partai itulah Khoirul Kalam menilai bahwa Partai Demokrat adalah partai yang bisa diajak untuk selalu sinergis dalam memperjuangkan apa yang menjadi keinginan masyarakat Madura, khususnya dalam memperjuangkan formalisasi syariaat Islam di pamekasan.

Latar belakang kuat Khoirul Kalam sebagai seorang aktivis inilah yang menjadikan Khoirul Kalam memeberanikan diri untuk maju menjadi anggota legislatif daerah pamekasan. Dengan dukungan penuh teman-teman HMI Pamekasan baik struktural maupun kultural maka Khoirul Kalam berhasil meraih suara terbanyak untuk pemilihan anggota legislatif daerah Pamekasan pada waktu itu. Selain Itu keberhasilan Khoirul Kalam dalam meraih suara banyak juga ditopang oleh popularitas Partai Demokrat dengan patron SBY sebagai Presiden pada Waktu itu.

Ketika Beliau menjabat sebagai anggota dewan, *sense* aktivisnya pun masih dapat dirasakan dalam setiap perjuangannya mewakili suara rakyat Pamekasan termasuk dalam memproduksi peraturan daerah yang bernuansa Islami, Sehingga tidak heran kalau Khoirul Kalam selalu berdiri di depan untuk menyampaikan aspirasinya sebagai mantan aktivis HMI

D. Sistem Pengetahuan dan Konstruksi Sosial Elit Partai Politik Nasionalis-sekuler tentang Upaya Formalisasi Syariah di Pamekasan

Elit partai politik nasionalis yang penulis jadikan objek penelitian adalah elit partai politik PDIP dan elit politik dari partai Golkar.⁷

1. Elit partai Nasionalis PDIP Berlatarbelakang keluarga agamis dengan Basic Pendidikan Agama

Bung Urip⁸ merupakan anak ketiga dari sembilan bersaudara. Ia dilahirkan di Pamekasan, pada 7 November 1954 tepatnya di Desa Klampar, Proppo. Keluarganya cukup

⁷ Dalam AD/ART PDIP, bab II Pasal 5 no 2 disebutkan bahwa jati diri partai adalah kebangsaan, kerakyatan dan keadilan social. Sedangkan dalam pasal 5 AD/ART Partai golkar diebutkan bahwa partai ini berasaskan pancasila

⁸ Urip, *wawancara*, Hotel Trio Indah Malang, 24 Maret 2013

agamis. Sebagaimana masyarakat Madura kebanyakan, mereka merupakan pengikut setia ormas NU. Setamat studinya di bangku SD Klampar, suami dari Siti Rahmah ini belajar di MTs Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Betet. Ia lalu menamatkan studi MA dan jenjang S1-nya di pondok tersebut.

Anggota Dewan dari fraksi PDIP yang akrab disapa dengan sapaan Bung Urip ini menikah pada tahun 1985. Hasil pernikahannya dengan Siti Rahmah, Ia dikaruniai 5 orang anak. Karirnya di Anggota dewan beliau mulai sejak menjadi Kepala Desa Klampar dari tahun 2000 sampai 2009. Sebuah prestasi yang luar biasa dan membanggakan untuk ukuran Kepala Desa bisa berkarir selam beberapa periode. Pembacaan *track record* politik sebagai Kepala Desa itulah yang kemudian mengilhami Bung Urip untuk maju menjadi anggota dewan melalui kendaraan politik partai PDIP. Dalam kacamata Bung Urip partai nasionalis merupakan partai yang unik sebagai basis dakwah. Menurut penuturannya, kalau beliau berangkat dari partai Islam maka tidak ada warna dalam dakwah Islam. Sebab tidak semua orang Madura khususnya masyarakat Pamekasan adalah masyarakat yang mempunyai latarbelakang keislaman yang kuat, sehingga harus ada upaya revitalisasi dari aspek dakwah Islam melalui partai nasionalis seperti PDIP. Dengan didukung basis suara masyarakat yang kuat dari desanya, maka pada tahun 2009, Bung Urip pun berhasil meraih suara yang signifikan, sehingga beliauapun memulai karirnya menjadi anggota DPRD Pamekasan. Di tengah ideologi partai nasional yang anti formalisasi syariat Islam, bung Urip dengan latar belakang agamisnya mencoba memberikan terobosan baru dalam menyuarakan gagasannya melalui prolegsda, namun gagasan keislamannya adalah gagasan keislamn yang bersifat substansial, bukan islam tekstual. Sebab apabila upaya formalisasi dengan normatif teksnya yang ditransformasikan maka akan mengakibatkan sakralitas hukum Islam menjadi lemah

dan tidak berwibawa . Sehingga upaya formalisasi syariah akan berjalan efektif manakala perjuangan tidak melalui jalur legislasi daerah yang konservatif.

2. Elit Partai Nasionalis Partai Golkar Berlatarbelakang Abangan Dengan Basic Pendidikan Umum

Elit Partai Politik Golkar yang satu ini bernama lengkap H. Boy Suhari Sajidin, SE⁹ yang akrab disapa Boy. Ia dilahirkan di Pamekasan, pada 24 Januari 1949. Latar belakang keluarganya memang bukan dari golongan yang agamis, ayahnya adalah seorang purnawirawan ABRI. Makanya saat informan yang satu ini ditanya mengenai ormas keagamaan yang pernah ia ikuti, ia menjawab netral. Ia memulai studinya di SD Bugih I Pamekasan, lalu dilanjutkan di SMPN I Pamekasan. Selanjutnya selama tiga tahun ia menamatkan studinya di SMAN I Pamekasan.

Ayah dari Winda Hertianti dan Fikri Budi Permana ini ternyata pernah mengenyam pendidikan tingkat sarjananya dua kali, hanya saja yang di Fakultas Pertanian PTPN (UPN) tidak sampai tamat. Ia lebih memilih menamatkan jenjang sarjananya di Fakultas Ekonomi STIE sampai akhirnya mendapat gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Selepas kuliah di bangku S1 ia mengasah kemampuan perekonomiannya dengan aktif di perdagangan tembakau. Menurutnya, Madura yang memang tempat kelahirannya sejak dulu terkenal sebagai penghasil tembakau yang cukup baik. Dalam menjalani karir profesinya, ia juga pernah menjadi kontraktor dalam berbagai bidang pembangunan.

Mengenai pengalaman organisasinya, sejak muda anggota Dewan yang akrab disapa dengan Pak Boy ini, aktif di Anggota Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) sebagai Bendahara. Sebagai anak seorang tentara ia juga aktif di Forum Komunikasi Purnawirawan dan ABRI (FKPBI). Ia juga pernah menjabat sebagai wakil ketua di organisasi KNPI. Dan itu

⁹ Boy, *wawancara*, Hotel Trio Indah Malang, 24 Maret 2013

merupakan modal penting bagi pak Boy sebelum Ia maju sebagai anggota Dewan legislatif Pamekasan.

Adapun jabatan profesi yang pernah diemban oleh suami Hermin Agustina ini, ia pernah menjabat Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau disingkat GAPENSI Tingkat Daerah dan menjadi Wakil Ketua GAPENSI Jatim. Ia juga pernah menjabat Ketua IPMI dan Wakil Ketua KADIN. Sementara kiprahnya di Golkar sendiri ia mulai sejak tahun 1987. Mulai aktif di kepemudaan, kemudian ia menjabat menjadi Bendahara, lalu sekretaris dan dua periode terakhir ia menjabat menjadi ketua.

Berangkat dari pengalamannya yang banyak makan asam garam dalam dunia perpolitikan itulah Hingga Akhirnya Pak Boy pada tahun 2004 mencoba maju menjadi anggota dewan legislatif daerah dengan kendaraan politik Golkar. Dengan modal popularitasnya Pak Boy pun berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Pamekasan. Ketika beliau menjabat sebagai anggota dewan, beliau juga aktif melakukan advokasi masyarakat muslim sebagai mayoritas penduduk di Madura. Hingga masa jabatannya habis pak Boy pun mencalonkan kembali pada tahun 2009 sebagai anggota dewan legislatif daerah yang ke dua kalinya. Pak boy pun berhasil meraih suara yang signifikan yang kedua kalinya, Di tengah ideologi Golkar yang nasionalis yang cenderung anti formalisasi syariaat Islam, pak Boy dengan latar belakang keluarga abangannya pun mencoba memberikan terobosan alternatif dalam menyuarakan gagasannya melalui prolegsda, namun gagasan keislamannya adalah gagasan keislaman yang bersifat substansial bukanlah Islam normatif.

E. Kategorisasi Alasan Konstruksi Sosial Elit Partai Islam terhadap upaya Formalisasi Syariah di Pamekasan

1. Kategorisasi Alasan teologis-normatif

Sebagaimana fakta yang kami temukan di lapangan bahwa dari semua informan partai politik Islam, melandaskan argumentasinya dalam memperjuangkan formalisasi syariah

berangkat dari doktrin normatif Al Quran dan Hadits. Sebab, bagi mereka Al Quran dan Hadits merupakan sumber otoritatif dalam hukum Islam. Sehingga menjadi sebuah keharusan ideologis bagi partai-partai Islam seperti PKS dan PPP untuk menjadikan hukum Islam sebagai sebuah hukum positif atau hukum yang mampu berjalan dalam kerangka konstitusi. Apalagi Partai Keadilan Sejahtera yang memang dalam Anggaran Dasar Rumah Tangganya secara terang-terangan menjadikan Islam sebagai ideologi partai mereka.

Selain dari pada itu, kategorisasi teologis juga dapat dilihat dari konstruksi mereka tentang apa itu formalisasi syariat Islam, jawaban mereka para elit partai Islam sangat varian. Misalnya Holili seorang elit Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengatakan bahwa syariat Islam merupakan perintah Tuhan yang harus diejawantahkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pusat maupun daerah. Karena dalam kaidah Ushul fiqih dikatakan *al Amru bi Syai' amrun bi wasailihi* yang artinya perintah sesuatu berarti sarana yang mengantarkan perintah tersebut juga harus diwajibkan. Sehingga Holili memahami bahwa upaya formalisasi syariat Islam merupakan sarana yang dapat mengantarkan kewajiban menegakkan hukum Islam. Hal itu merupakan sebuah kewajiban teologis, dan PPP sangat *commit* dalam memperjuangkan formalisasi syariat Islam ini. Namun perjuangan ini bukanlah perjuangan instan seperti membalikan telapak tangan kita. Akan tetapi perjuangan ini adalah perjuangan yang sangat kompleks¹⁰.

Sama halnya dengan apa yang diungkapkan oleh Holili, Suryono, Politisi Partai Keadilan Sejahtera juga melandaskan perjuangan syariah di pamekasan yang merupakan suatu keniscayaan teologis, sebab Allah sendiri berfirman *faman lam yahkum bima anzaallah fa ulaika humul kafirun.....*redaksi ayat ini mengharuskan kepada umat Islam untuk selalu menegakkan syariat Islam. Tentunya perjuangan tersebut harus melalui jalur politik dan kendaraan politiknya adalah PKS, yang selama ini mendapat predikat sebagai

¹⁰ Holili, *wawancara*, Pamekasan, 22 Maret 2013

partai yang paling *getol* dalam memperjuangkan hukum Islam ke dalam kerangka konstitusional. Apa lagi untuk konteks masyarakat Madura yang memang mayoritas penduduknya adalah umat Islam serta berlatar belakang pendidikan santri¹¹.

2. Kategori Alasan Sosiologis

Umat Islam adalah mayoritas di Pamekasan Madura sehingga itu merupakan pijakan sosiologi hukum dalam menentukan setiap kebijakan yang dibuat oleh dewan legislatif. Landasan sosiologi hukum seperti itulah yang sering menjadi konstruksi sosiologis para elit partai Islam untuk memperjuangkan formalisasi Syariat Islam di Pamekasan. Apa yang menjadi konstruksi dalam sistem kognitif mereka tidak pernah terlepas dari tesis yang pernah dilontarkan oleh Jeremy Bentham yang mengatakan *The great happiness for the great number*: artinya bahwa umat mayoritas adalah umat yang berhak untuk diakomodir secara sosiologis dalam kerangka hukum. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan elit partai Islam dari PKS yang mengatakan bahwa umat Islam di Pamekasan Madura adalah mayoritas, sehingga apa yang menjadi kehendak umat mayoritas untuk mentransformasikan hukum Islam ke dalam peraturan daerah di Pamekasan menjadi sebuah landasan konstruksi sosiologis mereka.

Hal senada juga pernah diungkapkan dalam wawancara Peneliti dengan Holili seorang Elit partai Islam dari PPP yang mengatakan bahwa sosiologi masyarakat Pamekasan merupakan beragama Islam, bahkan menurut Holili tanpa adanya formalisasi syariat Islam di Pamekasan pun, tradisi keislaman masyarakat sudah menjadi *living law* dalam kehidupan sehari-hari mereka. Namun tradisi keislaman tersebut tidak merata di *grass root* masyarakat Pamekasan dari kalangan pemuda yang tidak mempunyai latar belakang santri. Sehingga urgensi dari formalisasi syariat Islam di Pamekasan merupakan dalam rangka menyamaratakan atau meuniformkan syariat Islam menjadi sistem hukum Islam yang mampu

¹¹ Suryono, *wawancara*, Hotel Trio Indah Malang, 24 Maret 2013

bertahan di tengah kehidupan masyarakat Pamekasan. Sekaligus sebagai kontrol sosial masyarakat Pamekasan yang sudah terkooptasi oleh kehidupan globalisasi.¹²

3. Kategorisasi Alasan Politik

Sebagai ejawantah dari visi misi keseluruhan partai Islam yang berideologikan Islam, maka upaya memperjuangkan syariat Islam dalam kerangka Program Legislasi Daerah (prolegda), adalah sebuah alasan politik untuk meraih suara terbanyak di even-even pemilu. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengumbar janji dengan mengatasnamakan agama untuk tendensi elektabilitas partai Islam. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa umat Islam merupakan basis sosial yang dapat memperkuat posisi partai Islam di tengah kehidupan berdemokrasi masyarakat Pamekasan Madura.

Menurut Suryono salah seorang dari Elit Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan bahwa kami sebagai partai Islam yang *getol* dalam menyuarakan gagasan Islam harus senantiasa dapat mewakili aspirasi umat Islam yang menjadi *majority religion* di Pamekasan Madura. Masih menurut Suryono bahwa garis perjuangan PKS sangat jelas dalam persoalan politik, Ideologi PKS dengan jelas mengatakan bahwa PKS adalah partai yang berideologikan Islam, dan keberpihakannya selalu bersama umat Islam. Menurut Penulis hal inilah yang disebut sebagai konstruksi politik dalam upaya memformalisasikan hukum Islam di pamekasan¹³

Tabel 4.1 Kategorisasi Alasan Konstruksi Sosial Elit Partai Islam terhadap Upaya Formalisasi Syariah di Kabupaten Pamekasan

No	Kategori Alasan	<i>Behind Motive</i>
1	Konstruksi Teologis	Cenderung dogmatis dan menghendaki formalisasi syariah secara normatif-tekstual
2	Konstruksi Sosiologis	Menyandarkan argumentasinya pada Islam sebagai agama

¹² Holili wawancara, Pamekasan, 22 Maret 2013

¹³ Suryono, wawancara, Hotel Trio Indah Malang, 24 Maret 2013

		mayoritas masyarakat Pamekasan
3	Konstruksi Politis	Komitmen ideologis masing-masing partainya

F. Kategorisasi Alasan Konstruksi Sosial Elit Partai Nasionalis terhadap Upaya Formalisasi Syariah di Pamekasan

1. Kategorisasi Alasan Teologis

Alasan teologis dalam memperjuangkan formalisasi syariat Islam bukan hanya terjadi di partai-partai Islam, namun untuk konteks Pamekasan Madura partai yang berideologikan Nasionalis juga melandaskan argumentasinya pada alasan teologis. Sebagaimana hasil wawancara kami dengan Bung Urip yang mengatakan bahwa upaya formalisasi syariat Islam memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Pamekasan Madura, namun tidak juga sepenuhnya bahwa syariat Islam secara normatif ditransformasikan ke dalam peraturan Daerah. Sebagai bentuk ketaatan mereka kepada Allah, maka mereka dari kawan-kawan PDIP Pamekasan sangat berkomitmen dalam memperjuangkan aspirasi rakyat khususnya masalah kebutuhan masyarakat yang berkenaan dengan agama, akan tetapi bentuk perjuangan mereka tidak dalam bentuk formalisasi teks normatif hukum Islam akan tetapi lebih pada hal-hal yang bersifat substansial.”¹⁴

Hal senada juga disampaikan oleh Pak Boy anggota DPRD Pamekasan dari Golkar, Ia mengatakan bahwa Produk formalisasi syariat Islam di Pamekasan harus diperbanyak lagi, hal ini karena muslim di Pamekasan merupakan umat mayoritas. Sudah menjadi keyakinannya bahwa setiap agama khususnya agama Islam mempunyai aturan-aturan teologis yang berefek pada *social control* dan rekayasa Sosial. Berangkat dari persoalan itu maka tidak ada salahnya kalau formalisasi syariat Islam harus segera ditegakkan di Pulau yang notabeneanya disebut sebagai serambi Madinah ini. Partai manapun haram hukumnya menghalang-halangi umat Islam yang mempunyai keyakinan kuat bahwa hukum Islam

¹⁴ Urip, wawancara, Hotel Trio Indah, Malang; 24 Maret 2013

merupakan hukum yang dapat membahagiakan setiap hambanya bagi mereka yang taat dan bertakwa¹⁵

2. Kategori Alasan Sosiologis.

Begitu halnya yang disampaikan oleh Bung Urip yang dengan tegas mengatakan bahwa formalisasi syariat Islam secara substansi merupakan agenda PDIP Pamekasan dalam setiap program legislasi daerah (PROLEGSDA). Menurut Bung Urip hal ini disebabkan karakter asli masyarakat Pamekasan Madura adalah karakter Islam tradisional. Sehingga hukum Islam yang harus diperjuangkan dalam peraturan daerah adalah hukum Islam yang selaras dengan keraifan lokal masyarakat Pamekasan, bukan sebaliknya yang sangat bertentangan dengan kearifan lokal keagamaan masyarakat Pamekasan. Menurut Urip gagasan formalisasi secara normatif sangat bertentangan dengan kultur sosiologis masyarakat Pamekasan yang masih berpegang teguh pada patronisme ulama atau kiyai. Yang mana mayoritas Kiyai di pamekasan adalah penganut ormas NU bukan wahabisme yang cenderung memaksakan syariat Islam dalam bentuk normanya bukan substansinya¹⁶.

Hal senada juga disampaikan oleh Pak Boy yang mengatakan bahwa umat Islam Pamekasan adalah umat mayoritas, dan karakter sosiologis masyarakat Pamekasan Madura adalah karakter Islam akulturatif bukan karakter Islam garis keras yang biasanya seringkali memaksakan kehendak untuk menjadikan hukum Islam normatif menjadi peraturan daerah. Kalaupun ada yang seperti itu, sangat sedikit dan *minority*. Hal inilah yang menjadi basis sosiologi hukum yang harus menjadi pertimbangan kuat terkait karakter formalisasi syariat Islam di Pamekasan. Yang artinya upaya formalisasinya adalah formalisasi secara substansi¹⁷

3. Kategorisasi Alasan Politik

Pak Boy dengan jiwa politik nasionalismenya mengatakan bahwa saya adalah orang yang sudah dipercaya oleh rakyat Pamekasan untuk menjadi perwakilan mereka, maka

¹⁵ Boy, *wawancara*, Hotel Trio Indah, Malang; 24 Maret 2013

¹⁶ Urip, *wawancara*, Hotel Trio Indah, Malang; 24 Maret 2013

¹⁷ Boy, *wawancara*, Hotel Trio Indah, Malang; 24 Maret 2013

sebagai konsekuensi politiknya saya harus memperjuangkan aspirasi mereka dalam setiap proses pembuatan peraturan daerah Kabupaten Pamekasan. Sebab bagi Golkar ini adalah kontrak politik kami dengan masyarakat yang tidak boleh kita abaikan. Sehingga kami tidak menjadi anggota dewan seperti kacang yang lupa dengan kulitnya. Perjuangan syariat Islam secara substansi di Pamekasan menjadi komitmen politik kami kepada rakyat. Aspek politik inilah yang menjadi keterpanggilan Pak Boy untuk menyuarakan lantang formalisasi syariat Islam secara substansi.

Dalam konteks ini bung Urip¹⁸ lebih pragmatis dalam menyampaikan pendapatnya, menurutnya upaya memperjuangkan syariat Islam dalam kerangka Program legislasi Daerah (prolegda), adalah sebuah alasan politik untuk meraih suara terbanyak dalam setiap kesempatan pemilu daerah. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengumbar janji dengan mengatasnamakan agama untuk tendensi elektabilitas partai Islam. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa umat Islam merupakan basis sosial yang dapat memperkuat posisi partai Islam di tengah kehidupan berdemokrasi di masyarakat Pamekasan Madura.

Tabel 4.2 Kategorisasi Alasan Konstruksi Sosial Elit Partai Nasionalis terhadap Upaya Formalisasi Syariah di Kabupaten Pamekasan

No	Kategori Alasan	<i>Behind Motive</i>
1	Konstruksi Teologis	Konstruksi teologis substansial, yaitu upaya perjuangan dalam mentransformasikan hukum Islam ke dalam program legeslasi daerah secara substansi.
2	Konstruksi Sosiologis	Islam sebagai agama <i>majority</i> di Pamekasan, sistem demokratisasi di Indonesia menghendaki untuk mengakomodir kebutuhan hukum masyarakatnya.
3	Konstruksi Politis	cenderung pragmatis.

¹⁸ Urip, wawancara, Hotel Trio Indah, Malang; 24 Maret 2013

G. Kategorisasi Alasan Konstruksi Sosial Elit Partai Nasionalis Religius terhadap Upaya Formalisasi Syariah di Pamekasan

1. Kategorisasi Alasan Teologis

Mengenai alasan teologis dalam mengupayakan formalisasi syariah di Kabupaten Pamekasan, Imam Husairi mengatakan bahwa upaya formalisasi syariat Islam merupakan perintah Tuhan yang harus segera direalisasikan dalam bentuk perundang-undangan di daerah. Khususnya daerah Pamekasan yang memang disebut-sebut menjadi serambi Madinah setelah Aceh yang mendapatkan predikat serambi Mekkah. Imam Husairi mengatakan bahwa kalau di serambi Mekkah saja dapat berlaku formalisasi syariat Islam maka seharusnya di Serambi Madinah juga dapat berlaku formalisasi syariat Islam secara *kaffah* seperti di serambi Mekkah. Walaupun secara konstitusional serambi Mekkah atau Aceh mempunyai ketentuan khusus dalam sejarahnya; dan Madura, khususnya Pamekasan historisitas tersebut tidak punya. Namun meski demikian, para elit partai PKB tetap akan memperjuangkannya dengan penuh totalitas¹⁹

Khoirul Kalam anggota DPRD dari Partai Demokrat juga mengatakan bahwa Formalisasi syariat Islam merupakan kebutuhan teologis masyarakat muslim di Pamekasan, sebab negara kita merupakan negara demokrasi. Jadi siapapun sah untuk menyampaikan aspirasi teologisnya untuk ditransformasikan ke dalam undang-undang atau peraturan daerah. Sebab baginya, kebutuhan agama merupakan kebutuhan paling mendasar.”

Mantan Ketum cabang HMI pamekasan ini juga menyampaikan bahwa Secara pribadi walupun ia adalah dari partai nasionalis namun keberpihakannya terhadap transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional maupun ke dalam peraturan daerah sangat positif. Namun transformasi hukum Islam tersebut harus sudah diterjemahkan ke dalam konteks keindonesiaan; Atau dalam bahasa lain bentuk transformasinya adalah

¹⁹ Imam Husairi, *Wawancara*, Pamekasan, 22 Maret 2013

transformasi hukum Islam secara substansi bukan secara normatif. Sebagaimana Al Quran pada waktu itu diturunkan sesuai dengan keadaan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad (*Anzalallahu Al quran Munnajamn ala Hasbil hawadits*).²⁰

2. Kategorisasi Alasan Sosiologis

Khoirul Kalam menyampaikan pendapat dalam wawancaranya dengan penulis, bahwa tanpa ada dukungan dari kultur masyarakat Madura yang semi homegen yaitu mayoritasnya beragama Islam, maka formalisasi syariat Islam di Madura pamekasan tidak akan pernah terjadi. Oleh karenanya dengan dijadikanya Agama Islam sebagai sumber perilaku oleh masyarakat Pamekasan Madura maka menjadi sebuah keharusan sosiologis untuk mentransformasikan hukum Islam ke dalam peraturan daerah Pamekasan. Inilah yang disebut khoirul kalam sebagai sebuah basis *al ahkam al ijtima'i* untuk mengaokomodir apa yang menjadi kehendak masyarakat Pamekasan Madura. Dan ini menjadi pertimbangan kuat dalam program legislasi daerah di Pamekasan. Menurut Khoirul Kalam bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan maka saya sebagai lidah panjang dari masyarakat Pamekasan sangat berkepentingan untuk menyampaikan aspirasi tersebut²¹

Sedangkan Imam Husairi dari Elit Partai Islam PKB menyampaikan dalam wawancaranya bahwa agama Islam merupakan agama *al Mu'dzam* (mayoritas) di Pamekasan, sehingga tidak ada alasan sosiologis yang lain untuk menolak kehendak umat mayoritas yang sudah menjadi sistem perilaku di masyarakat Pamekasan ini. Bahkan Imam Husairi menambahkan bahwa mayoritas ulama dan Kiyai di Pamekasan Madura juga sangat sepakat untuk menjadikan syariat Islam sebagai sumber hukum dalam setiap penetapan perundang-undangan di daerah. Bagi Imam Husairi konstruksi ini merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh masyarakat Pamekasan madura. Bahkan menurutnya,

²⁰ Khoirul Kalam, *Wawancara*, Gedung DPRD Pamekasan, 21 Maret 2013

²¹ Khoirul Kalam, *Wawancara*, Gedung DPRD Pamekasan, 21 Maret 2013

kalau ada partai yang menghalang-halangi dalam upaya penegakan syariat dalam peraturan daerah di Pamekasan, maka partai-partai tersebut harus berhadapan dengan partai kami.

3. Kategorisasi Alasan Politis

Imam Husairi, elit politik dari PKB mengatakan bahwa sejak berdirinya hingga saat ini, PKB masih konsisten dengan perjuangan Islam kebangsaannya. Islam kebangsaan dalam konteks ini, menurut Imam Husairi adalah perjuangan formalisasi syariat Islam tanpa meninggalkan kearifan lokal budaya Indonesia yang telah menjadi karakter kebangsaan masyarakat muslim Indonesia. Sehingga konstruksi Imam Husairi dalam memperjuangkan formalisasi syariat Islam adalah konstruksi politik untuk mengambil simpatik para ulama dengan kultur primodialismenya serta patronisme kiyai di kalangan ulama Pamekasan Madura.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Khoirul Kalam²² yang mengatakan bahwa Partai Demokrat yang sekarang menjadi partai pemerintah tentunya bukan tanpa alasan, kami bisa menduduki pemerintahan pusat dan daerah-daerah itu

tidak lain karena faktor dukungan masyarakat kepada kami. Begitu halnya yang terjadi pada dirinya pribadi, yang pada pemilu 2009 yang lalu ia dipercaya oleh rakyat Pamekasan untuk menjadi perwakilan mereka di Kabupaten pamekasan. Tentunya perolehan suara tersebut ada kontrak politiknya antara ia dan para kiyai dan ulama yang menjadi patronisme masyarakat Pamekasan Madura. Dan upaya formalisasi syariat Islam di Pamekasan adalah kehendak para ulama dan sesepuh Kabupaten Pamekasan untuk menjadikan Pamekasan sebagai Kabupaten yang bernuansa Islami. Dan sesuai dengan kontrak politik kami dari kawan-kawan Demokrat selalu siap mengawal komitmen politik tersebut.

Tabel 4.3 Kategorisasi Alasan Konstruksi Sosial Elit Partai Nasionalis-Religius terhadap Upaya Formalisasi Syariah di Kabupaten Pamekasan

²² Khoirul Kalam, *Wawancara*, Gedung DPRD Pamekasan, 21 Maret 2013

No	Kategori Alasan	<i>Behind Motive</i>
1	Konstruksi Teologis	teologis substansial, yaitu upaya perjuangan dalam mentransformasikan hukum Islam ke dalam program legeslasi daerah secara substansi.
2	Konstruksi Sosiologis	Islam sebagai agama <i>majority</i> di Pamekasan, sistem demokratisasi di Indonesia menghendaki untuk mengakomodir kebutuhan hukum masyarakatnya.
3	Konstruksi Politis	1) Elit Partai Demokrat = pragmatis; 2) Elit Politik PKB = Kompromistis.

